



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL
ENTITAS AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN BARU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, terdapat perubahan perangkat daerah selaku entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Mempawah;
 - b. bahwa Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi melakukan pengelolaan anggaran, aset dan kewajiban serta menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan dengan berpedoman kepada Kebijakan dan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - c. bahwa langkah awal pelaksanaan kegiatan akuntansi pada perangkat daerah sebagai entitas akuntansi adalah melakukan pencatatan saldo awal akun-akun laporan keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL ENTITAS AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017 DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

4. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
7. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
8. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
10. Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
11. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
12. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
13. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi dalam menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2017 dalam rangka implementasi kelembagaan baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;

Pasal 3

- (1) Saldo awal akun neraca pada Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dicatat sesuai nilai saldo akhir akun Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (2) Adapun Perangkat Daerah yang baru dibentuk sebagai Entitas Akuntansi mencatat saldo awal akun Tahun Anggaran 2017 dengan nilai 0 (nol) Rupiah. Rincian pencatatan saldo awal dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- (3) Perpindahan hak dan kewajiban dari perangkat daerah kelembagaan yang lama kepada perangkat daerah kelembagaan yang baru, dilakukan melalui proses perpindahan/mutasi hak dan kewajiban yang dicatat sebagai transaksi dalam proses akuntansi dengan melakukan proses penjurnalan.

Pasal 4

Proses penjurnalan atas mutasi hak dan kewajiban, terdiri dari:

- a. Jurnal atas mutasi Kas dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima Kas dari Perangkat Daerah Kelembagaan Lama yang memberi, dan Perangkat Daerah Kelembagaan Baru yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi kas sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b. Jurnal terhadap mutasi Piutang dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima piutang dari Perangkat Daerah Kelembagaan Lama yang memberi dan Perangkat Daerah Kelembagaan Baru yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi piutang dapat dilihat pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- c. Jurnal atas mutasi Penyisihan Piutang dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima penyisihan piutang dari Perangkat Daerah Kelembagaan Lama yang memberi, dan Perangkat Daerah Kelembagaan Baru yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- d. Jurnal atas mutasi Belanja Dibayar Dimuka dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima Belanja Dibayar Dimuka dari Perangkat Daerah Kelembagaan Lama yang memberi, dan Perangkat Daerah

Kelembagaan Baru yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Peraturan Bupati ini;

- e. Jurnal atas mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dari Perangkat Daerah Kelembagaan Lama yang memberi, dan Perangkat Daerah Kelembagaan Baru yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
- f. Jurnal atas mutasi Persediaan dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima Persediaan dari Perangkat Daerah Kelembagaan Lama yang memberi, dan Perangkat Daerah Kelembagaan Baru yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi persediaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
- g. Jurnal atas mutasi Investasi dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima Investasi dari Perangkat Daerah Kelembagaan Lama yang memberi, dan Perangkat Daerah Kelembagaan Baru yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi aset sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- h. Jurnal atas mutasi Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari Perangkat Daerah Kelembagaan Lama yang memberi dan Perangkat Daerah Kelembagaan Baru yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi aset sebagaimana dimaksud pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
- i. Jurnal atas mutasi Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima aset lainnya dan penyusutan aset lainnya dari Perangkat Daerah Kelembagaan Lama yang memberi, dan Perangkat Daerah Kelembagaan Baru yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi aset sebagaimana dimaksud pada Lampiran X Peraturan Bupati ini;
- j. Jurnal atas mutasi Kewajiban dilakukan atas dasar Berita Acara Serah Terima Kewajiban dari Perangkat Daerah Kelembagaan Lama yang memberi, dan Perangkat Daerah Kelembagaan Baru yang menerima. Daftar Perangkat Daerah yang melakukan penjurnalan atas mutasi aset sebagaimana dimaksud pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini;

Pasal 5

Perpindahan/mutasi hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, harus diungkap secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan entitas akuntansi dan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-1-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017... NOMOR 6.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 27-1-2017

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

RINCIAN SALDO AWAL AKUN NERACA PADA LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA SKPD 2016	ASET														
		ASET LANCAR		INVESTASI JANGKA PANJANG		JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	ASET TETAP					JUMLAH ASET TETAP				
		Persediaan	Pemindahan Piutang	Investasi Non Permanen	Investasi Permanen		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jwan, Kipas dan Jipitan	Aset Tetap Lainnya		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Akumulasi Penyusutan		
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH-RAGA	1.492.500,00	-	934.858.637,81	-	-	6.152.472.582,00	22.895.759.218,01	187.570.500.048,80	512.998.707,72	39.849.573.031,75	-	(102.198.969.325,58)	151.792.440.262,81		
2	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	86.500,00	-	69.500,00	-	-	15.254.420,00	1.564.950.140,00	7.283.013.790,00	80.233.373,00	1.488.525.506,00	-	(2.898.090.996,31)	7.945.886.136,69		
3	DINAS KESEHATAN	4.749.545.600,00	-	6.158.563.599,89	-	-	4.841.506.192,00	54.075.322.361,30	43.340.771.931,00	854.978.000,00	3.445.506,00	-	(48.505.057.727,49)	72.448.178.256,81		
4	RSUD dr. RUBIN	1.888.207.538,00	-	4.204.470.038,00	-	-	2.570.871.606,00	34.668.196.593,27	27.125.632.487,40	1.715.291.000,00	-	-	(29.722.344.721,30)	38.778.246.959,35		
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	558.767.900,00	-	874.125.900,00	-	-	143.512.028.891,00	15.417.709.741,67	78.869.858.108,08	762.105.011.790,06	-	10.543.821.733,50	(333.752.055.502,83)	894.706.874.781,48		
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.122.000,00	-	5.622.000,00	-	-	-	2.638.212.825,00	5.829.654.904,00	99.748.700,00	1.806.506,00	-	(3.483.338.820,96)	5.386.277.808,01		
7	DINAS PERHUBUNGAN KERLOMPOK DAN PARIWISATA	3.512.500,00	-	6.515.800,00	-	-	1.280.049.900,00	6.376.354.300,00	14.688.616.725,00	32.699.969.865,00	1.110.290.000,00	-	(30.327.175.420,96)	25.796.074.369,01		
8	BADAN LINDUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.520.430,00	-	50.520.430,00	-	-	10.706.509,00	8.521.771.915,06	2.426.066.000,00	84.663.200,00	424.943.525,00	-	(6.850.000,00)	6.818.881.200,19		
9	DINAS KEPENCUCUKAN DAN PENGADATAN SIPIL	294.162.200,00	-	294.162.200,00	-	-	48.893.000,00	1.596.624.350,00	236.779.500,00	49.587.000,00	-	-	(11.347.998.710,71)	873.587.138,29		
10	BADAN KEBPPAUM DAN PD	725.148.535,00	-	725.148.535,00	-	-	-	4.696.371.850,00	2.665.987.951,37	58.000.000,00	-	-	(3.334.425.316,14)	4.283.934.685,23		
11	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	1.150.000,00	-	-	262.003.580,00	3.064.784.691,00	1.443.907.120,00	198.379.000,00	-	-	(3.349.179.717,07)	1.587.904.963,93		
12	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	24.157.200,00	-	24.157.200,00	-	-	-	719.127.508,00	-	-	-	-	(839.773.829,43)	71.353.878,57		
13	KANTOR SATUAN POLIS PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	1.459.190.800,00	721.468.000,00	8.799.400,00	-	-	(1.408.524.500,72)	790.833.699,28		
14	DPHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	SUPATI WAHIL RUPATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	SEKRETARIAT DAERAH	1.106.000,00	-	1.106.000,00	-	-	28.863.923.544,53	31.342.444.512,46	45.431.463.221,01	958.950.250,00	242.735.300,00	-	(34.837.158.571,50)	71.902.358.298,53		
17	SEKRETARIAT DPRD	2.482.200,00	-	2.482.200,00	-	-	350.270.550,00	10.348.652.710,00	12.354.121.113,00	878.886.812,00	47.789.900,00	-	(11.748.607.856,09)	12.225.893.028,91		
18	DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)	78.121.000,00	-	11.781.450.866,77	-	-	1.176.098.481,00	7.778.594.570,00	7.344.778.800,00	608.560.630,00	27.938.500,00	-	(8.374.652.505,02)	8.588.328.445,38		
19	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-	-	15.750.000,00	957.832.300,00	-	-	3.900.000,00	-	(700.526.557,15)	275.945.842,85		
20	KECAMATAN MEMPAWAH HUIR	906.500,00	-	906.500,00	-	-	9.590.000,00	735.972.400,00	84.978.690,00	15.060.300,00	-	-	(5.15.947.400,38)	304.063.908,22		
21	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	252.000,00	-	252.000,00	-	-	302.232.800,00	735.846.450,00	2.706.915.000,00	-	-	-	(782.879.542,13)	2.066.074.737,87		
22	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT	81.000,00	-	81.000,00	-	-	17.000.000,00	719.380.219,00	342.719.800,00	20.312.800,00	-	-	(791.222.599,35)	307.890.219,65		
23	KECAMATAN SUNGAI PINYUH	-	-	-	-	-	3.888.000,00	754.276.269,00	2.591.298.300,00	15.826.000,00	-	-	(746.205.859,54)	2.817.323.969,46		
24	KECAMATAN ANUJONG	27.600,00	-	27.600,00	-	-	175.544.033,00	695.947.269,00	1.458.682.500,00	11.490.400,00	-	-	(87.269.387,33)	1.581.884.914,87		
25	KECAMATAN TOHO	-	-	-	-	-	5.900.000,00	798.253.759,00	2.598.323.200,00	-	-	-	(871.030.136,95)	2.731.448.833,05		
26	KECAMATAN SADANG	-	-	-	-	-	49.725.000,00	607.759.719,00	1.661.380.300,00	-	-	-	(887.788.800,61)	1.821.045.918,39		
27	KECAMATAN SEGEDONG	1.206.800,00	-	1.206.800,00	-	-	199.711.273,00	747.116.919,00	1.653.287.220,00	-	-	-	(674.328.498,67)	1.828.785.915,40		
28	KECAMATAN SIANTAN	598.000,00	-	598.000,00	-	-	179.817.900,00	748.033.009,00	2.683.164.700,00	7.500.000,00	-	-	(354.527.944,24)	2.754.987.674,76		
29	KELURAHAN TERUSAN	-	-	-	-	-	-	248.587.000,00	211.798.341,31	-	-	-	(379.293.023,25)	141.972.318,05		
30	KELURAHAN PULAU PEDALAMAN	-	-	-	-	-	4.761.822,00	250.016.000,00	816.952.100,00	2.000.000,00	26.324.000,00	-	(296.102.484,70)	803.851.437,30		
31	KELURAHAN TENGAH	-	-	-	-	-	40.204.300,00	223.946.550,00	336.431.000,00	-	-	-	(195.027.252,73)	405.598.987,27		
32	KELURAHAN TANJUNG	-	-	-	-	-	15.198.200,00	226.951.500,00	532.436.200,00	-	-	-	(240.886.046,38)	533.681.653,62		
33	KELURAHAN PASIR WAN GALUM	-	-	-	-	-	4.221.970,00	295.796.300,00	427.594.860,00	3.000.000,00	-	-	(243.404.081,61)	487.988.068,19		
34	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	-	-	-	-	-	8.215.440,00	285.888.700,00	148.726.700,00	-	-	-	(230.067.514,94)	213.753.328,16		
35	KELURAHAN ANUJONG MELANGAR	-	-	-	-	-	11.996.925,00	245.448.550,00	84.258.000,00	-	-	-	(179.671.382,24)	181.132.121,76		
36	BADAN KEPERAWATAN DAERAH	315.000,00	-	315.000,00	-	-	-	2.223.482.850,00	7.356.350.200,00	66.777.000,00	6.960.500,00	-	(2.054.106.822,44)	7.599.433.827,56		
37	DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	126.805.500,00	-	126.596.570,74	-	-	1.393.471.506,00	7.270.629.068,80	10.301.633.114,74	1.925.374.657,72	11.800.000,00	-	(6.184.801.219,65)	14.719.437.342,61		
38	BADAN KEAMANAN PAISAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN	390.837.500,00	-	390.837.500,00	-	-	1.083.384.785,00	2.408.199.050,00	3.849.482.860,00	-	-	-	(3.215.151.025,55)	4.137.975.869,45		
39	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	-	-	-	-	-	4.578.255.895,38	5.700.234.940,29	16.844.499.142,62	23.800.894.975,59	114.959.413,19	-	(18.476.908.863,31)	32.381.925.504,36		
40	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UKM PERTAMBANGAN DAN ENERGI	500.000,00	-	831.348.685,33	-	-	2.798.841.190,00	2.176.738.650,00	19.777.010.022,07	1.157.208.800,00	-	520.360.000,00	(2.917.171.895,37)	25.815.786.558,70		
41	PELABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	JUMLAH	9.026.923.693,00	-	57.304.056.868,38	-	-	14.735.000.000,00	14.735.000.000,00	199.782.490.263,91	237.446.940.838,83	511.979.408.660,80	847.755.659.461,09	40.394.580.669,95	29.251.052.333,50	(642.920.883.473,36)	1.203.589.468.804,02

RINCIAN SALDO AWAL AKUN NERACA PADA LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA BKPD 2016	ASET						TOTAL ASET per 31 Desember 2016	KEWAJIBAN DAN EKUITAS				TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
		ASET LAINNYA							JUNJAH ASET LAINNYA	KEWAJIBAN				EKUITAS				
		Teghan Perbaikan Anggaran	Tunai dan Ganti Rugi	Kembalian dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Amortisasi	Aset Lain-lain			Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PTK)	Pendapatan Operasi Dimulainya			Utang Berjangka	Utang Jangka Pendek Lainnya		
1	DINAS PENCIPTAAN PEMUDA DAN OLARAHAGA				855.653.686,00	(171.899.541,42)	73.877.018.412,76	71.366.772.764,34	224.088.101.656,56				224.088.101.656,56	224.088.101.656,56				
2	KANTOR REPUBLIKANKAN DAN ARSIP DAERAH							7.845.955.636,89					7.845.955.636,89	7.845.955.636,89				
3	DINAS KESEHATAN				300.080.000,00	(300.080.000,00)	335.000,00	335.000,00	40.987.051.987,35				40.987.051.987,35	40.987.051.987,35				
4	RSUD @ RUBIN							87.868.861.735,12	(15.628.382.129,00)	52.237.779.894,12	747.818.880.267,60			747.818.880.267,60	747.818.880.267,60			
5	DINAS PENJUALAN UMUM							81.190.000,00		81.190.000,00	5.453.089.808,01			5.453.089.808,01	5.453.089.808,01			
6	BADAN PENWANGAIAN PEMANGKALAN DAERAH																	
7	DINAS PERHUBUNGAN KERUCUKAN DAN PARWISATA				18.947.000,00	(2.736.714,29)	778.232.200,00	794.472.485,71	26.599.060.654,72				26.599.060.654,72	26.599.060.654,72				
8	BADAN LINDUNGAN HUP DAN PENANGKALAN DENCANA DAERAH																	
9	DINAS KEPENDIDIKAN DAN PENDATATAN SIPIL				16.000.000,00	(16.000.000,00)	21.773.000,00	21.773.000,00	889.822.339,29		409.410,00		889.412.929,29	889.412.929,29				
10	BADAN KEBERPAKTI DAN PD								48.245.000,00				48.245.000,00	48.245.000,00				
11	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								167.637.300,00				167.637.300,00	167.637.300,00				
12	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU				231.238.800,00	(211.789.867,15)	5.800.000,00	(5.800.000,00)	19.448.942,85				122.959.821,42	122.959.821,42				
13	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								20.280.000,00				20.280.000,00	20.280.000,00				
14	DPKD																	
15	BUPATI WAKIL BUPATI																	
16	SEKRETARIAT DAERAH				73.500.000,00	(53.300.000,00)	11.024.963.219,92	(350.880.000,00)	10.684.583.219,92		3.447.918,87		32.584.599.599,78	32.584.599.599,78				
17	SEKRETARIAT DPMD								30.000.000,00				30.000.000,00	30.000.000,00				
18	DINAS PENCAPAIAN PENGELOLAKEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD)				1.188.223.950,00	(896.173.565,72)	365.520.000,00		687.570.264,28			667.184.823,18	530.018.576,00	12.028.349.596,43				
19	INSPEKTORAT KABUPATEN		122.786.538,28					122.786.538,28	388.732.181,13				388.732.181,13	388.732.181,13				
20	KECAMATAN MEMPAWAH HUIR							750.000,00	310.320.489,02				310.320.489,02	310.320.489,02				
21	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR							20.700.000,00	2.988.964.707,87				2.988.964.707,87	2.988.964.707,87				
22	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT							18.000.000,00	325.971.219,65				325.971.219,65	325.971.219,65				
23	KECAMATAN SUNGAI PINYUH				4.550.000,00			4.550.000,00	2.621.573.909,46				2.621.573.909,46	2.621.573.909,46				
24	KECAMATAN ANJONGAN								1.561.722.514,67				1.561.722.514,67	1.561.722.514,67				
25	KECAMATAN TOHO							16.500.000,00	2.747.946.833,05				2.747.946.833,05	2.747.946.833,05				
26	KECAMATAN SADANJANG								1.621.095.818,39				1.621.095.818,39	1.621.095.818,39				
27	KECAMATAN BEGEGONG								1.926.992.715,40				1.926.992.715,40	1.926.992.715,40				
28	KECAMATAN SIANTAN								2.764.685.874,76				2.764.685.874,76	2.764.685.874,76				
29	KELURAHAN TERUSAN							17.215.000,00	158.787.318,05				158.787.318,05	158.787.318,05				
30	KELURAHAN PULAU PEDALAMAN								803.951.437,30				803.951.437,30	803.951.437,30				
31	KELURAHAN TENGAH								405.556.597,27				405.556.597,27	405.556.597,27				
32	KELURAHAN TANJUNG					6.000.000,00		6.000.000,00	539.681.853,82				539.681.853,82	539.681.853,82				
33	KELURAHAN PASIR WAN SALIM								487.568.068,19				487.568.068,19	487.568.068,19				
34	KELURAHAN SUNGAI PINYUH								313.783.325,18				313.783.325,18	313.783.325,18				
35	KELURAHAN ANJONGAN MELANGAR								181.132.121,76				181.132.121,76	181.132.121,76				
36	BADAN KEGAWAAN DAERAH								7.599.748.927,56				7.599.748.927,56	7.599.748.927,56				
37	DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN DAN KEMUTAHAN							6.518.670.569,00	(126.616.733,33)	6.392.053.835,67			21.238.090.749,02	21.238.090.749,02				
38	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN							205.925.000,00	(22.365.000,00)	183.560.000,00			4.712.373.169,46	4.712.373.169,46				
39	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN				18.189.000,00			18.189.000,00	2.998.428,57				32.364.523.938,53	32.364.523.938,53				
40	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UKM PERTAMBANGAN DAN ENERGI							313.790.314,40		313.790.314,40			24.780.924.958,43	24.780.924.958,43				
41	PELJASAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)								45.620.455.905,62				46.741.537.419,02	46.741.537.419,02				
	JUMLAH		122.786.538,28		2.483.643.645,00	(1.931.949.788,57)	158.503.985.751,20	(18.150.334.433,76)	143.328.431.702,15	1.419.059.977.394,53			87.623.773,79	674.481.239,85	2.311.594.436,00	4.878.918.436,00	1.419.104.259.408,39	1.419.104.259.408,39


 BUPATI MEMPAWAH
 RIA NORSAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TANGGAL : 27-11-2017
 TENTANG : TATA CARA PENCATATAN SALDO AWAL
 ENTITAS AKUNTANSI TAHUN ANGGARAN 2017
 DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN
 BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	NAMA SKPD 2018	ASET																
		ASET LANGGAR													Aset Lainnya			
		Kas di Kas Daerah	Kas di Bendahara Pengeluaran	Kas di Bendahara Penerimaan	Kas Lainnya	Investasi Jangka Pendek	Piutang Pajak			Piutang Retribusi	Belanja Dibayar dimuka	Bagian Lancar Kepada Pemerintah Pusat	Bagian Lancar Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Persewaan Anggaran	Bagian Lancar Turunkan Ganti Rugi	Piutang Lainnya		
					Bruto	Penyisihan	Netto							Bruto	Penyisihan	Netto		
1	DINAS PENUNDAAN PELAJAR DAN OLAH RAGA				928.515,497.25													
2	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH														4.890.540.25		4.890.540.25	
3	DINAS KESEHATAN		41.156.363.00		1.325.861.546.89													
4	RSUD dr. RUSNI			8.308.000.00					2.216.954.509.00									
5	DINAS PEKERJAAN UMUM								315.050.000.00					308.000.00				
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													3.500.000.00				
7	DINAS PERHUBUNGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								3.001.300.00									
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																	
9	DINAS KEPENDULIHAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
10	BADAN KBRPPAPM DAN PD																	
11	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI													1.150.000.00				
12	KANTOR PENANAWAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU																	
13	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																	
14	DPRD																	
15	BUPATI WAKIL BUPATI																	
16	SEKRETARIAT DAERAH																	
17	SEKRETARIAT DPRD																	
18	DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)								15.429.996.742.07	(6.538.271.869.88)	8.891.724.872.19			23.750.000.00	2.787.875.014.58			
19	INSPEKTORAT KABUPATEN																	
20	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR																	
21	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR																	
22	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT																	
23	KECAMATAN SUNGAI PINYUH																	
24	KECAMATAN ANJONGAN																	
25	KECAMATAN TOHO																	
26	KECAMATAN SADANIANG																	
27	KECAMATAN SEGEDONG																	
28	KECAMATAN SIANTAN																	
29	KELURAHAN TERUSAN																	
30	KELURAHAN PULAU PEDALAWAN																	
31	KELURAHAN TENGAH																	
32	KELURAHAN TANJUNG																	
33	KELURAHAN PASIR WAN SALIM																	
34	KELURAHAN SUNGAI PINYUH																	
35	KELURAHAN ANJUNGAN MELANGAR																	
36	SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																	
37	DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN																	
38	SADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN																	
39	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN																	
40	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UMM PERTAMBANGAN DAN ENERGI				8.054.548.00													
41	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)	15.136.363.588.02												44.091.340.00				
	JUMLAH	15.136.363.588.02	41.156.363.00	8.308.000.00	2.280.431.982.15	-	15.429.996.742.07	(6.538.271.869.88)	8.891.724.872.19	2.535.005.900.00	44.091.340.00	-	-	23.708.000.00	2.787.875.014.58	18.920.480.541.82	(2.338.031.348.29)	16.582.449.193.42

ASSET

NO.	NAMA SKPD 2018	ASET LANGKAH			INVESTASI JANGKA PANJANG			ASET TETAP						JUMLAH ASET TETAP			
		Persediaan	Pershian Piutang	JUMLAH ASET LANGKAH	Investasi Non Permanen	Investasi Permanen	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	ASET TETAP									
								Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan		Akumulasi Penyusutan		
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA	1.482.500,00	-	834.888.837,81	-	-	-	6.152.472.582,90	22.855.755.218,51	187.570.960.548,86	512.948.701,72	36.884.519.031,78	-	(102.198.969.025,95)	191.782.448.262,81		
2	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	69.500,00	-	69.500,00	-	-	-	15.254.420,90	1.964.966.140,00	7.283.013.790,00	85.233.873,00	1.488.525.500,00	-	(2.896.060.596,31)	7.845.896.138,60		
3	DINAS KESEHATAN	4.789.545.690,00	-	6.156.543.999,88	-	-	-	4.641.500.192,00	54.075.322.361,00	43.340.771.631,00	854.978.900,00	3.445.000,00	17.967.220.800,00	(48.545.267.727,46)	72.442.178.356,81		
4	RSUD dr. RUBIN	1.985.267.538,00	-	4.208.470.638,00	-	-	-	2.510.871.600,00	34.958.796.583,27	27.125.632.487,40	1.715.291.000,00	-	-	(28.702.344.721,32)	36.778.348.958,35		
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	558.787.900,00	-	874.125.890,00	-	-	-	143.512.628.891,00	15.437.799.741,87	26.969.858.128,08	782.105.011.750,06	-	10.533.821.733,54	(233.752.966.627,83)	884.736.874.787,48		
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.122.000,00	-	5.622.000,00	-	-	-	-	2.939.212.825,00	5.825.854.964,00	99.748.700,00	-	-	(3.482.338.591,96)	1.394.877.868,01		
7	DINAS PERHUBUNGAN KERJAJAYAN DAN PARIWISATA	3.512.500,00	-	6.513.800,00	-	-	-	1.260.049.900,00	6.378.354.300,00	14.688.616.725,00	32.619.968.865,00	1.110.290.000,00	-	(30.327.175.420,99)	25.768.874.269,01		
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.520.430,00	-	50.520.430,00	-	-	-	10.799.500,00	9.521.771.910,00	2.426.066.000,00	84.603.200,00	-	99.850.000,00	(5.548.823.134,81)	6.816.881.860,19		
9	DINAS KEPENDUDULAN DAN PENCATATAN SIPIL	294.162.200,00	-	294.162.200,00	-	-	-	48.892.000,00	1.588.624.350,00	236.775.900,00	49.587.900,00	-	-	(1.347.396.710,71)	4.293.834.485,23		
10	BADAN KEPPANGAN DAN PD	725.146.535,00	-	725.146.535,00	-	-	-	-	4.896.371.850,00	2.965.967.961,37	56.000.000,00	-	-	(3.324.426.355,14)	4.293.834.485,23		
11	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSFORMASI	1.130.000,00	-	1.130.000,00	-	-	-	252.003.580,00	3.004.704.961,30	1.443.907.120,00	196.379.000,00	-	-	(3.245.179.727,07)	1.567.854.863,83		
12	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	24.157.200,00	-	24.157.200,00	-	-	-	-	219.127.569,30	-	-	-	-	(628.773.829,43)	78.253.678,57		
13	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	-	1.458.190.860,00	721.468.000,00	8.796.400,00	-	-	(1.408.524.500,72)	789.933.889,28		
14	DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	BUPATI WAKIL BUPATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	SEKRETARIAT DPRD	1.106.000,00	-	1.106.000,00	-	-	-	28.983.923.544,53	31.342.444.512,43	45.431.463.221,61	858.950.250,00	242.735.000,00	-	(34.937.158.571,56)	71.802.258.258,53		
18	DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DIPNAD)	2.482.200,00	-	2.482.200,00	-	-	-	350.270.550,00	13.348.652.710,00	12.354.121.113,00	878.866.612,00	42.786.900,00	-	(11.748.367.858,06)	12.228.893.478,91		
19	INSPEKTORAT KABUPATEN	78.101.000,00	-	11.781.458.886,77	-	-	-	1.176.008.481,00	7.778.594.570,00	7.344.778.800,00	606.680.830,00	27.838.500,00	-	(8.374.652.535,82)	8.559.328.445,28		
20	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	806.500,00	-	908.500,00	-	-	-	5.500.000,00	735.072.400,00	64.978.890,00	15.000.000,00	-	-	(700.538.557,15)	275.945.842,85		
21	KECAMATAN MEMPAWAH TAJUR	252.000,00	-	252.000,00	-	-	-	202.232.800,00	736.848.450,00	2.798.815.300,00	2.798.815.300,00	-	-	(515.941.400,98)	308.883.989,02		
22	KECAMATAN SUNGAI ALINYIT	81.000,00	-	81.000,00	-	-	-	17.000.000,00	718.380.219,00	342.719.300,00	20.012.800,00	-	-	(791.222.596,35)	307.890.219,65		
23	KECAMATAN SUNGAI PINYUH	-	-	-	-	-	-	3.888.000,00	754.270.269,00	2.591.266.300,00	15.806.000,00	-	-	(494.208.659,54)	2.817.823.269,46		
24	KECAMATAN ANJONGAN	27.600,00	-	27.600,00	-	-	-	175.544.630,00	695.047.259,00	1.456.892.600,00	11.850.400,00	-	-	(787.895.387,23)	1.551.684.914,67		
25	KECAMATAN TOHO	-	-	-	-	-	-	5.900.000,00	796.253.759,00	2.568.323.200,00	-	-	-	(621.830.135,95)	2.731.444.123,05		
26	KECAMATAN SADANJANG	-	-	-	-	-	-	46.725.000,00	807.750.719,00	1.681.380.000,00	-	-	-	(867.798.800,51)	1.823.095.918,49		
27	KECAMATAN SEGEDONG	1.206.800,00	-	1.206.800,00	-	-	-	196.711.273,00	747.115.919,00	1.653.287.220,00	-	-	-	(674.228.466,92)	1.823.765.915,48		
28	KECAMATAN SIANTAN	598.000,00	-	598.000,00	-	-	-	179.917.900,00	748.333.069,00	2.683.154.700,00	7.500.000,00	-	-	(854.527.534,24)	2.744.087.674,76		
29	KELURAHAN TERUSAN	-	-	-	-	-	-	-	248.567.000,00	211.758.341,31	-	-	-	(375.353.223,26)	141.672.378,05		
30	KELURAHAN PULAU PEDALAMAN	-	-	-	-	-	-	4.761.822,00	259.016.000,00	816.952.100,00	2.000.000,00	26.324.000,00	-	(296.152.464,70)	803.951.437,30		
31	KELURAHAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	40.204.308,00	223.946.556,00	338.431.300,00	-	-	-	(156.617.252,73)	485.558.397,27		
32	KELURAHAN TANJUNG	-	-	-	-	-	-	15.198.290,00	226.961.500,00	532.438.200,00	-	-	-	(243.308.346,38)	533.681.153,62		
33	KELURAHAN PASIR WAN SALIM	-	-	-	-	-	-	4.221.670,00	285.756.300,00	427.494.860,00	3.000.000,00	-	-	(433.464.361,87)	487.549.968,19		
34	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	-	-	-	-	-	-	9.215.440,00	285.888.700,00	140.726.700,00	-	-	-	(230.067.514,54)	213.763.225,16		
35	KELURAHAN ANJONGAN MELAYAR	-	-	-	-	-	-	11.395.925,00	246.448.550,00	84.255.000,00	-	-	-	(179.971.263,24)	181.132.121,76		
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	315.000,00	-	315.000,00	-	-	-	-	2.223.822.850,00	7.356.350.200,00	66.777.000,00	8.950.500,00	-	(2.254.128.522,44)	7.589.433.827,56		
37	DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN DAN KEMUTANAN	109.809.500,00	-	126.599.570,74	-	-	-	1.203.471.500,00	7.270.829.080,83	10.301.933.114,74	1.826.374.857,72	11.530.000,00	-	(8.184.861.218,65)	14.719.437.342,81		
38	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN	390.837.500,00	-	390.837.500,00	-	-	-	1.083.364.795,00	2.408.796.050,00	3.648.482.860,00	11.450.000,00	-	-	(3.215.151.025,55)	4.137.915.369,45		
39	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	-	-	-	-	-	-	4.578.255.895,38	5.730.234.946,29	16.844.499.142,82	23.600.884.975,59	114.269.413,19	-	(18.478.508.363,37)	32.981.825.568,86		
40	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UKM PERTAMBANGAN DAN ENERGI	500.000,00	-	821.340.083,33	-	-	-	2.798.641.180,00	2.179.738.650,00	15.777.010.022,07	-	-	520.360.000,00	(2.817.171.865,27)	23.815.786.556,70		
41	PEJABAT PENGELOLA KEJANGKARAN DAERAH (PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH		8.020.823.083,60	-	57.304.056.888,38	-	-	-	14.735.000.000,00	14.735.000.000,00	199.782.480.263,91	237.446.940.888,83	511.878.468.880,80	847.758.888.481,89	40.394.528.969,85	28.251.852.332,50	(642.828.882.472,86)	1.231.889.488.964,62

NO.	NAMA SKPD 2016	ASET						TOTAL ASET per 31 Desember 2016	KEWAJIBAN DAN EKUITAS				TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
		ASET LAINNYA							Jumlah ASET LAINNYA	KEWAJIBAN				EKUITAS	
		Tagihan Penyertaan Anggaran	Tuntutan Ganti Rugi	Kembaraan dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Akumulasi Amortisasi	Aset Lain-lain			Akumulasi Penyertaan Aset Lain-lain	Jang Perhitungannya Pihak Ketiga (PTK)	Pendapatan Ditunda Dimasukan			Utang Bekerja
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN BUDAYA				655.853.895,00	(171.889.541,42)	70.817.318.412,78	71.380.772.766,34	224.088.101.868,58	44.122.394,90			224.043.955.752,58	224.043.955.752,58	
2	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH							7.945.955.834,89					7.945.955.834,89	7.945.955.834,89	
3	DINAS KESEHATAN					95.343.000,00	95.343.000,00	78.790.881.858,78	43.427.889,79	3.848.569,36	1.791.166.500,00		78.790.881.858,78	78.790.881.858,78	
4	RSUD B. RUBINI				300.000.000,00	(300.000.000,00)	325.000,00	325.000,00	40.987.951.967,35				40.987.951.967,35	40.987.951.967,35	
5	DINAS PEKERJAAN UMUM						87.866.961.735,12	(15.629.082.129,00)	52.737.779.894,12				747.918.890.267,60	747.918.890.267,60	
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						61.190.000,00	61.190.000,00	5.453.089.808,91				5.453.089.808,91	5.453.089.808,91	
7	DINAS PERHUBUNGAN KERJAJAYAAN DAN PARIWISATA				18.847.000,00	(2.205.714,29)	778.237.200,00	784.472.485,71	24.549.060.854,72				24.549.060.854,72	24.549.060.854,72	
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							6.849.401.430,19					6.849.401.430,19	6.849.401.430,19	
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL				16.000.000,00	(16.000.000,00)	21.773.000,00	21.773.000,00	889.412.505,25		405.410,00		889.412.505,25	889.412.505,25	
10	BADAN KEPERAWATAN DAN PO						48.245.000,00	48.245.000,00	5.057.326.820,23				5.057.326.820,23	5.057.326.820,23	
11	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						167.637.300,00	167.637.300,00	1.728.892.263,93				1.728.892.263,93	1.728.892.263,93	
12	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU				231.238.800,00	(211.289.857,15)	5.890.000,00	(5.890.000,00)	19.448.842,81				122.959.821,42	122.959.821,42	
13	KANTOR SATUAN POLIS PAMONG PRAJA						20.280.000,00	20.280.000,00	801.213.898,28				801.213.898,28	801.213.898,28	
14	DPKD														
15	BUPATI WAKIL BUPATI														
16	SEKRETARIAT DAERAH				73.500.000,00	(63.000.000,00)	11.024.963.216,92	(350.890.000,00)	10.634.583.216,92		3.447.915,67		82.544.550.569,78	82.544.550.569,78	
17	SEKRETARIAT DPRD						30.000.000,00	30.000.000,00	12.258.315.228,91				12.258.315.228,91	12.258.315.228,91	
18	DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)				1.138.223.960,00	(866.173.685,72)	365.520.000,00	867.370.264,28	21.828.348.596,43		967.184.823,18	530.018.575,00	19.831.146.197,25	21.828.348.596,43	
19	INSPEKTORAT KABUPATEN		122.785.538,28					122.785.538,28	368.732.181,13				368.732.181,13	368.732.181,13	
20	KECAMATAN MEMPAWAH HELE						750.000,00	750.000,00	319.320.489,02				319.320.489,02	319.320.489,02	
21	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR						20.700.000,00	20.700.000,00	2.388.968.707,87				2.388.968.707,87	2.388.968.707,87	
22	KECAMATAN SUNGAI LINTAU						18.000.000,00	18.000.000,00	325.871.218,85				325.871.218,85	325.871.218,85	
23	KECAMATAN SUNGAI PINYUH						4.550.000,00	4.550.000,00	2.621.573.908,46				2.621.573.908,46	2.621.573.908,46	
24	KECAMATAN ANJONGAN							1.551.722.514,87	1.551.722.514,87				1.551.722.514,87	1.551.722.514,87	
25	KECAMATAN TOHO						16.500.000,00	16.500.000,00	2.747.848.833,05				2.747.848.833,05	2.747.848.833,05	
26	KECAMATAN SADANGANG							1.621.045.818,38	1.621.045.818,38				1.621.045.818,38	1.621.045.818,38	
27	KECAMATAN SEGEDONG							1.924.982.715,40	1.924.982.715,40				1.924.982.715,40	1.924.982.715,40	
28	KECAMATAN SIANTAN							2.784.885.874,78	2.784.885.874,78				2.784.885.874,78	2.784.885.874,78	
29	KELURAHAN TERUSAN					17.715.000,00	17.715.000,00	158.787.318,05					158.787.318,05	158.787.318,05	
30	KELURAHAN PULAU PEDALAMAN							803.951.437,30					803.951.437,30	803.951.437,30	
31	KELURAHAN TENGAH							405.558.587,27					405.558.587,27	405.558.587,27	
32	KELURAHAN TANJUNG					8.300.000,00	8.300.000,00	538.881.853,62					538.881.853,62	538.881.853,62	
33	KELURAHAN PASIR WAN SALIM							487.568.068,18					487.568.068,18	487.568.068,18	
34	KELURAHAN SUNGAI PINYUH							213.763.325,18					213.763.325,18	213.763.325,18	
35	KELURAHAN ANJONGAN MELANGAR							181.132.121,78					181.132.121,78	181.132.121,78	
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							7.589.748.927,58					7.589.748.927,58	7.589.748.927,58	
37	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNYIAN DAN KULITAN					6.518.670.569,00	(126.915.720,20)	8.392.655.838,87	21.238.090.749,02				21.238.090.749,02	21.238.090.749,02	
38	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN						205.925.000,00	183.580.000,00	4.712.373.189,45				4.712.373.189,45	4.712.373.189,45	
39	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN				18.185.000,00		(15.580.571,43)	2.584.428,57	32.364.523.828,53				32.364.523.828,53	32.364.523.828,53	
40	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI, UKM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI					313.720.314,40		313.720.314,40	24.780.924.858,43				24.780.924.858,43	24.780.924.858,43	
41	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)							45.620.455.905,02			4.878.918.486,00		45.620.455.905,02	45.620.455.905,02	
	JUMLAH		122.785.538,28		2.483.843.845,80	(1.621.848.789,57)	138.581.885.261,20	(16.150.334.433,78)	143.328.431.702,15		1.419.058.877,394,53		1.419.058.877.394,53	1.419.058.877.394,53	

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal... 27...1... 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

[Signature]

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ...2017... NOMOR ...6.....

BUPATI MEMPAWAH

[Signature]

RIANORSAN